

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Natuna Pada triwulan III yang berlangsung dari bulan Juli sampai dengan September 2025 harga komoditi barang pokok dan penting cenderung stabil, fluktuatif perubahan harga tidak melebihi poin ± 1 . Ini menunjukkan harga pada TW III ini cenderung stabil, bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga. Dari triwulan I dan II, triwulan ke III merupakan triwulan yang paling stabil. Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok dan penting pada triwulan III di Kabupaten Natuna:

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	Perubahan Harga (%)
1	Beras	16,200	16,200	16,200	-
2	Gula	17,571	17,429	17,429	- 0.01
3	Minyak Goreng	18,857	18,857	18,857	-
4	Tepung Terigu	15,143	15,000	15,000	- 0.01
5	Daging	140,000	140,000	140,000	-
6	Telur Ayam Ras	59,571	59,571	60,000	0.01
7	Cabe Merah	62,308	64,231	65,385	0.05
8	Bawang Merah Jawa	39,857	40,929	41,429	0.04
9	Kacang Kedelai	14,000	14,000	14,000	-

Dari data stok ketersediaan bahan pangan strategis pada triwulan III menunjukkan bahwa kebutuhan beras dan gula sudah terpenuhi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka ketersediaan beras melebihi angka kebutuhan. Berikut neraca kebutuhan barang pokok dan penting di Kabupaten Natuna:

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna Bukan Daerah Penghasil. Kabupaten Natuna bukanlah Daerah Produsen atau penghasil barang kebutuhan pokok, hampir semua bahan kebutuhan pokok Pemerintah Kabupaten Natuna berasal dari luar daerah Kabupaten Natuna yaitu dari Tanjungpinang, Pontianak, Batam dan Jakarta.
2. Kapasitas penyimpanan. Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa gudang disetiap Kecamatan di Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kendala ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan dalam pendistribusian barang dari daerah asal akibat

No	Komoditas	Ketersediaan (ton)			Kebutuhan (ton)			Netto (ton)		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1	Beras	61,10	44,79	49,12	432,00	492,80	478,20	1069,98	1089,69	958,92
2	Gula	67,88	67,31	68,41	66,31	66,31	64,17	1,57	1,00	4,24
3	Minyak Goreng	33,06	32,61	26,73	82,26	82,26	79,61	49,20	-49,66	-52,88
4	Perak	42,32	1,28	2,50	3,51	3,51	3,40	38,81	-2,23	-0,90
5	Pertanian	8,40	9,48	10,29	11,29	11,29	10,92	-2,89	-1,81	-0,64
6	Cabe Merah	3,27	2,95	2,50	22,20	22,20	21,49	-18,93	-19,25	-18,99
7	Bawang Merah Jawa	3,27	2,95	2,50	22,20	22,20	21,49	-18,93	-19,25	-18,99

3. Cuaca Ekstrim. Cuaca ekstrim masih berlangsung pada triwulan ke III ini, hal ini menyebabkan nelayan tidak bisa melaut sehingga. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Natuna mengakibatkan pohon tumbang hingga mengakibatkan kerusakan rumah warga.
- 4.5 Pertanian. Bertanian di Kabupaten Natuna masih minim, masyarakat masih bergantung dari hasil nelayan. Padahal luas dataran Kabupaten Natuna cukup luas dan masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
5. Ketersediaan anggaran yang minim terutama sekali pada OPD terkait sehingga capaian realisasi kinerja terhambat terutama sekali dalam pelaksanaan Kegiatan Bazar Pangan Murah, Operasi Pasar Murah dan Pelaksanaan rapat dan koordinasi dengan pihak-pihak dan lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan lain-lain.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Tim TPID yang di Pimpin oleh Kepala Daerah. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna mengenai arahan dari

Menteri Dalam Negeri tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Surat Bupati Natuna Nomor 500/257/SETDA-EKONSDA/IX/2025 menyurati Bank Indonesia (BI) untuk Pelaksanaan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Natuna.

2. Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring. Melaksanakan Koordinasi terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur dan Kecamatan Bunguran Utara .
3. Monitoring dan Koordinasi BBM. Dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa Kecamatan pada bulan Agustus dan September 2025.
4. Pengawasan Bahan Pokok dan Penting. Pengawasan Bahan Pokok dan Penting oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi.
5. Gerakan Pangan Murah. Gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2025 dan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Polres Natuna selama Bulan Agustus 2025 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Natuna.
6. Penyerahan bantuan bibit cabe. Penyerahan bantuan bibit cabe kepada lima kelompok tani Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kemandirian pangan daerah.
7. Peresmian gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Acara peresmian di pimpin oleh Sekretaris Kementerian UMKM RI bersama Bupati Natuna dengan harapan menjadi Pusat Layanan Terpadu dalam memberikan upaya pendampingan, pembinaan dan akses pemasaran produk-produk UMKM Natuna.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun perlu dimaksimalkan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan Bazar Pangan yang telah dilakukan oleh Polres Natuna selama bulan Agustus 2025 dan TNI AD dan AU.
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.
3. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna, maka merekomendasikan beberapa kebijakan Pengendalian Inflasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat sistem logistik khususnya Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah terluar melalui subsidi angkutan laut.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mengalokasikan dukungan dana melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan fasilitas Cool Storage (pendingin dan penyimpanan) dalam menjaga kualitas hasil perikanan, pertanian maupun pangan segar lainnya tetap awet dan tidak cepat rusak.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Bulog untuk membangun gudang di beberapa Kecamatan terluar di Kabupaten Natuna seperti Serasan, Subi dan Pulau Laut dikarenakan kondisi geografis Natuna yang terdiri atas Pulau-pulau sehingga terbatasnya fasilitas penyimpanan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok di wilayah perbatasan.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan dan Petani untuk meningkatkan hasil perikanan dan pertanian, sehingga Natuna bisa menjadi daerah penghasil.